

PB 10 - 08/2025



# SUBSIDI PRODUK PERTANIAN : SOLUSI MENUJU BADUNG BERDAULAT PANGAN

**I Made Ari Artaya****I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati**

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Badung - Bali

**Ditujukan Kepada**

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

## Pendahuluan

Sektor pertanian di Kabupaten Badung merupakan sektor unggulan ketiga setelah sektor penyediaan jasa akomodasi dan makan minum serta sektor transportasi dan pergudangan. Namun, data BPS menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB mengalami penurunan sebesar 2,61% dari 8,51% pada tahun 2021 menjadi 5,88% pada tahun 2024, seiring dengan kembali pulihnya sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Badung, menurut data sektor pariwisata mengalami peningkatan sebesar 2,51% dari 23,21% pada tahun 2021 menjadi 25,72% pada tahun 2024.

Agustus 2025

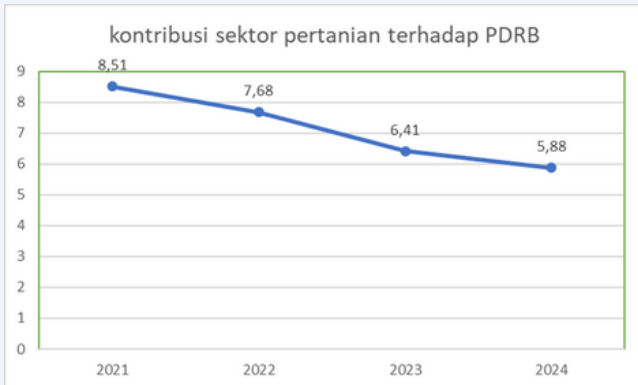


## Ringkasan Eksekutif

Pertanian di Kabupaten Badung berada di persimpangan penting, meski menjadi sektor unggulan ketiga, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus merosot seiring pulihnya sektor pariwisata. Padahal, pertanian memegang peran vital dalam menjaga ketahanan pangan daerah dan membuka peluang kerja di wilayah pedesaan. Ironisnya, sektor ini justru menghadapi tantangan serius: rendahnya minat generasi muda, dominasi petani usia lanjut, harga komoditas yang tidak stabil, keterbatasan infrastruktur, serta hilirisasi dan adopsi teknologi yang belum maksimal.

Untuk membalikkan keadaan dan menghidupkan kembali daya tarik sektor ini, dirumuskan tiga kebijakan strategis yang saling melengkapi : 1. Subsidi Plus 20% untuk Komoditas Strategis Pemerintah daerah didorong memberikan subsidi tambahan sebesar 20% terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan biaya produksi, 2. Modernisasi dan Peningkatan Infrastruktur Pertanian: Investasi dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana produksi pertanian menjadi kunci serta penerapan smart farming untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing hasil pertanian lokal, 3. Penguatan Hilirisasi dan Industri Pasca Panen :Transformasi hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah melalui pengolahan, pengemasan, dan diversifikasi produk akan membuka peluang pasar baru serta menciptakan ekosistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan.

Keberhasilan kebijakan ini menuntut sinergi yang kuat antara peraturan (Perda dan Perbup), penetapan komoditas prioritas, dan tata kelola distribusi oleh BUMD atau lembaga distribusi daerah. Kebijakan subsidi 20% dinilai sebagai langkah paling strategis yang dapat memberikan dampak langsung dan cepat terhadap keberlanjutan sektor. Namun, dampak jangka panjang hanya akan tercapai jika seluruh strategi dijalankan secara terintegrasi, berkelanjutan, dan didukung oleh pendanaan daerah yang memadai. Sasaran Aktor Kebijakan: Bupati Badung, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, BUMD atau Lembaga Distribusi Pemerintah, Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset, Generasi Muda dan Pelaku Usaha Pertanian.



Hal ini mengindikasikan pentingnya perhatian pemerintah pada sektor pertanian guna mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dari segala sektor. Berdasarkan data BPS Kabupaten Badung, sektor pertanian mampu mendukung 15-20% lapangan kerja di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan potensi tersebut dengan mengambil langkah-langkah untuk menumbuhkan kembangkan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung.

## Deskripsi Masalah

Kabupaten Badung sebagai salah satu wilayah di Bali, menghadapi tantangan dalam sektor pertanian. Hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Adapun metode yang digunakan dalam menentukan permasalahan yaitu menggunakan metode Pohon masalah melalui 5W dan 1H. Saat ini, sektor pertanian masih dianggap kurang bergengsi dan tidak menjanjikan dari segi ekonomi. Untuk mengubah persepsi tersebut, perlu ada program-program khusus yang memfasilitasi generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian, karena dukungan dan keterlibatan generasi muda pada sektor pertanian sangat diharapkan.

Generasi muda dengan latar belakang teknologi dan kewirausahaan sangat potensial untuk membawa perubahan positif dalam sistem pertanian Badung.

Berdasarkan data Sensus Pertanian Tahun 2023 kelompok umur 39 - 65 tahun lebih dominan dalam melakukan usaha pertanian yaitu sebanyak 16.335 orang dibandingkan kelompok petani milenial yang berumur 19 - 39 tahun yaitu hanya sebanyak 1.267 orang. Untuk itu, perlu mendorong kembali generasi muda selaku petani milenial agar menjadikan sektor pertanian sebagai usaha yang menjanjikan. Disamping itu, penurunan pada sektor pertanian juga dipengaruhi permasalahan mendasar, seperti ketidakpastian harga hasil pertanian atau nilai tukar petani. Dalam situasi seperti ini, petani tidak memiliki jaminan pendapatan yang stabil, fluktuasi harga pasar yang dapat turun drastis di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan HPP yang ditetapkan oleh Pemerintah tersebut juga belum mampu memberikan kesejahteraan bagi petani. Selain itu, masih minimnya pemanfaatan teknologi dan pembangunan infrastruktur yang belum memadai dapat mengurangi produktivitas dan distribusi pasca panen.

Penggunaan alat dan mesin pertanian modern, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara signifikan. Namun, penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Tanpa adanya kolaborasi lintas sektor, inovasi pertanian sulit untuk diadopsi secara luas di tingkat petani. Kondisi ini diperparah dengan belum optimalnya pengelolaan produksi dari hulu ke hilir, padahal kita ketahui Badung Selatan sebagai kawasan pariwisata dapat dijadikan sebagai pasar hasil produk pertanian, sehingga pengembangan konsep penanganan produk pertanian dari hulu sampai akhir dapat diterapkan di Kabupaten Badung.

Namun potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena belum maksimalnya strategi pengembangan yang terstruktur serta berorientasi pada keberlanjutan. Salah satu aspek penting yang belum diperhatikan adalah program hilirisasi produk pertanian, program ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian.



Belum maksimalnya program Manajemen pertanian modern (management farming) yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam seluruh siklus produksi dan distribusi pertanian .

## Alternatif Kebijakan

Beberapa alternatif kebijakan yang dapat disampaikan sebagai solusi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung, adalah sebagai berikut :

### **Pemberian Subsidi plus 20% Produk Pertanian.**

Pemerintah Daerah memberikan subsidi berupa jaminan pembelian produk pertanian dengan harga pembelian pemerintah (HPP) dan biaya produksi ditambah 20%, langkah ini dilakukan untuk memberikan perlindungan harga bagi petani agar mereka mendapatkan keuntungan yang layak, bahkan di tengah fluktuasi harga pasar yang tidak stabil, karena Penetapan HPP oleh pemerintah dirasa belum memberikan harga yang sesuai dengan produktifitas petani.

Harga pembelian pemerintah (HPP) gabah atau beras yang ditetapkan pemerintah masih berada di bawah biaya produksi petani. Bisa dibuktikan dengan melihat Permendag Nomor 24 Tahun 2020, yaitu HPP GKP sebesar Rp 4.200/kg, sementara berdasarkan kajian Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) pada 2019, biaya produksi gabah di dalam negeri mencapai Rp 4.523/kg. hal ini membuktikan bahwa biaya produksi lebih tinggi dari harga penjualan (Farida Sekti Pahlevi, 2021).

Sedangkan untuk komoditas cabai, bawang, jagung dan palawija, pemberian subsidi dapat diberikan melalui perhitungan biaya produksi, mengingat fluktuasi harga komoditas tersebut di tentukan oleh harga pasar. Statistik Harga Kabupaten Badung tahun 2021 menyebutkan bahwa harga komoditas kacang panjang mengalami fluktuasi harga dari tahun 2018-2021 di Kecamatan mengwi, abiansemal dan kuta utara.

Sedangkan komoditas cabai merah juga mengalami fluktuasi harga dari tahun 2017-2023 di kecamatan mengwi dan abiansemal berdasarkan Statistik Harga Kabupaten Badung tahun 2023. Untuk itu, dalam pemberian subsidi 20% untuk komoditas GKG dapat diberikan apabila harga GKG berada dibawah dan sama dengan HPP, sedangkan komoditas lainnya dapat diberikan subsidi 20% jika harga pasar dibawah atau sama dengan biaya produksi.

### **Pembangunan Infrastruktur Pertanian dan Bantuan Sarana dan Prasarana Produksi.**

Pembangunan Infrastruktur pertanian yang memadai, dalam mendukung produktivitas dan distribusi hasil pertanian. pemerintah daerah juga dapat memberikan bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana produksi, seperti peralatan pertanian modern dan fasilitas penunjang peternakan. Perlu juga dilakukan Pemetaan Klaster Komoditi Pertanian, alam upaya untuk efisiensi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas produk pertanian, pemetaan klaster komoditi pertanian yang berbasis pada persil kepemilikan. Perlu juga penerapan program Smart Farming dalam rangka modernisasi sektor pertanian, dengan memanfaatkan teknologi digital dan pertanian presisi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

### **Program Pengembangan Industri Pengolahan Pasca Panen.**

Program hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Industri pengolahan pasca panen seperti pengemasan, pengeringan, fermentasi, dan diversifikasi produk masih sangat terbatas. Hilirisasi seharusnya menjadi bagian dari strategi besar untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Badung, disamping mengembangkan Konsep Bio-konversi yakni pengolahan sisa hasil pertanian menjadi pakan ternak atau energi alternatif.



## Rekomendasi

Dari ketiga alternatif tersebut diatas, setelah dilakukan Grid Analysis (Matrix Analysis) terhadap aspek Keberterimaan, Efektifitas, Aksesibilitas, Efisien dan aspek Legal Suitability, bahwa dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Badung dapat dioptimalkan melalui Pemberian Subsidi plus 20% terhadap harga pembelian pemerintah (HPP) dan biaya produksi pada komoditas Produk Pertanian. Dalam implementasinya didukung oleh dasar hukum yang jelas:

**Pertama**, Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan agar digunakan sebagai harga minimum pembelian hasil pertanian oleh pemerintah daerah. Subsidi plus 20% adalah skema tambahan insentif kepada petani apabila harga produk pertanian berada dibawah harga pasar dan dibawah HPP yang sudah ditetapkan. Kebijakan ini agar dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) untuk memberikan dukungan harga tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan kondisi pasar.

**Kedua**, Pemberian Subsidi plus 20% ini, harus menentukan jenis komoditas yang akan menerima bantuan insentif tersebut, pemetaan wilayah luasan tanam produk pertanian terhadap komoditas tertentu serta pengelolaan distribusi dan pembelian hasil pertanian melalui BUMD atau lembaga distribusi pemerintah lainnya.

**Ketiga**, Mekanisme pembiayaan dan penyaluran pemberian Subsidi plus 20% terhadap HPP dan biaya produksi produk pertanian, agar dituangkan secara teknis dalam Peraturan Bupati, melalui pemberian bantuan keuangan kepada lembaga pemerintah/BUMD yang terlibat dalam pembelian produk pertanian yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

## Daftar Pustaka

- Farida Sekti Pahlevi, 2021, Efektifitas Permendag No.24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah atau Beras dalam menghadapi krisis petani di Indonesia, *AlSyakhsyiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021)
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2022). *Insentif Pertanian dan Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah*. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pertanian Bali. (2022). *Pengembangan Teknologi Pertanian di Bali dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani*. Denpasar: LP3B.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. (2024). *Statistik PDRB Kabupaten Badung*. Badung: BPS Kabupaten Badung.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung. (2023). *Rencana Strategis Pembangunan Sektor Pertanian Kabupaten Badung 2024-2030*. Badung: Bappeda Kabupaten Badung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung No. 3 Tahun 2020. tentang Insentif untuk Produk Pertanian di Kabupaten Badung: Pemerintah Kabupaten Badung.
- Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani: Pemerintah Kabupaten Badung.